

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Ripley, Randall B., & Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureucracy*. Chicago: Chicago Dorsey Press.
- Sadar. (2023). *E-Government (Konsep, Implementasi dan Evaluasi E-Government di Indonesia)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sugiono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Wicaksono, S. R. (2023). *Konsep Dasar E-Government (Issue December)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8004026>
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Sumber Jurnal/Skripsi/Disertasi/Tesis

- Abdalla, M. Z. (2016). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak), - *Brawijaya Knowledge Garden*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/118562/>
- Akib, H. M., & Makassar, U. N. (2016). Implementasi Kebijakan : Apa , Mengapa dan Bagaimana. <https://doi.org/10.26858/jiap.289>
- Ali, E. (2003). E-Government Untuk Pemerintahan Daerah.
- Azwar, H. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus BPJS Kesehatan di Kawasan Industri Cikarang). 11(3), 259–267.
- Dewi, R., Remaja, I. N. G., & Surata, I. G. (2021). Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan

- Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 9(2), 67-96.
- Dunleavy, P., Margetts, H., & Bastow, S. (2006). New Public Management Is Dead — Long Live Digital-Era New Public Management Is Dead — Long Live Digital-Era Governance. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Ebrahim, Z., & Irani, Z. (2014). E-government adoption : architecture and barriers. *November*. <https://doi.org/10.1108/14637150510619902>
- Effendy, Z., & Subowo, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan E-Government di Kota Semarang. *EJurnal Undip*, 1(1), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/22675/20742>
- Fisika, Maimuna. (2019). Model Implementasi Ripley dan Franklin. <https://www.scribd.com/document/401860468/ModelImplementasiKebijakan-Ripley-Dan-Franklin>
- Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*. 2(1). 174–201.
- Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., & Lutpi, A. J. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kota Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 875-886.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan Npm Ke Good Governance. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23.
- Mahendrari, & Ardiyansyah. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. 7 (1). 197 - 211.
- Mufidah, M., & Rahmadanik, D. (2022). Implementasi Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya. *PRAJA Onserver: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 32-38.
- Munawarah, & Subadi, W. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Absensi Online E-Office Di Bidang Pemadam Kebakaran Pada Kantor Satpol Pp Dan Damkar Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 780-795.
- Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 22-30.
- Novalia, D., Etika, G., & Lubna, K. (2024). Publik Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi* 10(1), 128–

136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>

- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan. 7(2), 238–246.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Publika*, 10(2), 1111-1122.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-government: Studi Terhadap Aplikasi Smart In Pirt di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*. 6(10), 245-263.
- Rifdan, & Herman. (2023). Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan E-Government pada Pelayanan Publik di Kota Pare-Pare. 120 – 143.
- Saifullah, Iqbal, M., & Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 44-55.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). JEAM Vol XI No. 1/2012 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabhu*. 5(1), 52–68.
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3(1).
- Wardana, I. G. N., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance di Era Digital. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5), 1-8. : <https://doi.org/10.61292/shkr.178>
- Zein, M. H. M., Prasutra, D. F., & Septiani, S. (2024). Implementasi Kebijakan E-Government dalam Administrasi Kepegawaian. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. 1(3), 107–119.

Sumber Lain – Lain

- Anugrah, A. (2024). Banyumas Urutan 3 penyalahgunaan narkoba di jawa tengah, nomor 2 HIV AIDS. *iNews Purwokerto*. <https://purwokerto.inews.id/read/460454/banyumas-urutan-3-penyalaahgunaan-narkoba-di-jawa-tengah-nomor-2-hiv-aids>
- Aziza, U. N. (2024). Tata Cara Membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba: Syarat, Tempa, dan Biaya. *DetikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d->

[7398076/tata-cara-membuat-surat-keterangan-bebas-narkoba-syarat-tempat-dan-biaya](https://www.bnn.go.id/7398076/tata-cara-membuat-surat-keterangan-bebas-narkoba-syarat-tempat-dan-biaya)

BNN Kabupaten Banyumas. (2024). <https://banyumaskab.bnn.go.id/>.

Istanto, B. A. (2024). Surat Keterangan Bebas Narkoba: Cara Membuat, Syarat, Biaya. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7158230/surat-keterangan-bebas-narkoba-cara-membuat-syarat-biaya>.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Surat edaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Tentang Penerapan aplikasi BOSS dalam pelaksanaan layanan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

User Manual BOSS. Administrasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

